

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PRODUK MULTIGUNA TANPA AGUNAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
TANGGULANGIN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:
AQIDATUL IZZA

NIM : G94214132



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018**

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PRODUK MULTIGUNA TANPA AGUNAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
TANGGULANGIN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ekonomi Syariah

Oleh :
AQIDATUL IZZA
NIM : G94214132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Aqidatul Izza

Nim : G94214132

Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Aqidatul Izza

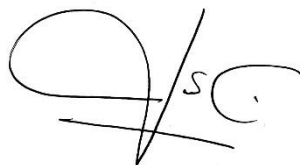
NIM. G94214132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aqidatul Izza NIM. G94214132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Maret 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a diagonal slash and the letters 'SC'.

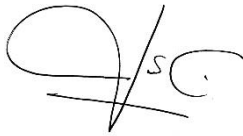
Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aqidatul Izza NIM.G94214132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 04 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji II,



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji IV



Aris Fanani, M.Kom
NIP. 198701272014031002

Surabaya, 09 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqidatul Izza
NIM : G94214132
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : aqidatulizza1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK MULTIGUNA

TANPA AGUNAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU TANGGULANGIN

SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 April 2018

Penulis

(Aqidatul Izza)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo”** merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo pada pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan.

Metode penelitian adalah Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara kepada Direktur I, kepala cabang pembantu, para pegawai, dan anggota pembiayaan yang bermasalah. Observasi dilakukan dengan pengamati bagaimana pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo melakukan penagihan kepada anggota yang bermasalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pada produk Multiguna Tanpa Agunan sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku, dimana pemohon menyerahkan berbagai persyaratan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo. Dokumen tersebut akan dilakukan analisa dan survey guna mengetahui keabsahan dari dokumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya i'tikad baik anggota, anggota mengalami musibah, dan kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal. Adapun strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan adalah melakukan analisa 5C terhadap pengajuan anggota dan menerapkan sistem penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa *reschedulling*, dan *reconditioning*. Melalui strategi tersebut, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat meminimalisir kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan supaya pihak BMT UGT Sidogiri lebih teliti terhadap analisa anggota dan strategi penanganan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan sedini mungkin untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, Multiguna Tanpa Agunan, Prinsip 5C, *Reschedulling, Reconditioning*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penulisan	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II PEMBIAYAAN BERMASALAH, PEMBIAYAAN MULTIGUNA TANPA AGUNAN, <i>BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWIL</i>	
A. Pembiayaan Bermasalah	25
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	25
2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan	28
3. Prinsip Analisa Pra Pembiayaan	32
B. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA).....	35
1. Definisi Pembiayaan Tanpa Agunan.....	35

Capital merupakan besaran modal yang dimiliki oleh anggota dalam menjalankan usaha. Semakin besar modal yang dimiliki anggota, maka semakin baik penilaian BMT terhadap pemohon. Hal tersebut meyakinkan BMT terkait usaha yang dijalankan oleh anggota. *Condition of economy* terkait dengan kondisi ekonomi wilayah. *Collateral* merupakan besaran agunan yang diberikan kepada pihak BMT. Agunan yang diberikan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BMT dan agunan tersebut harus mempunyai nilai jual. Sehingga, agunan tersebut dapat dijadikan jaminan apabila anggota tidak mampu melakukan pembayaran. Pihak BMT

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 81

dapat melakukan pelelangan atau penjualan atas agunan yang diserahkan oleh anggota.

Meninjau dari persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan oleh BMT, masyarakat merasa sulit dan enggan untuk melakukan pembiayaan. Terlebih karena adanya persyaratan penyerahan agunan. Adanya prasyarat tersebut, masyarakat memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih mudah. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa rentenir yang bisa memberikan pembiayaan yang cepat dan mudah. Mengatasi persoalan tersebut, BMT memberikan solusi dengan menawarkan produk bebas penyerahan agunan pada persyaratan dan prosedur pra pembiayaan.

Salah satu BMT yang menerapkan produk tanpa agunan adalah BMT UGT Sidogiri. BMT UGT Sidogiri menawarkan produk Multiguna Tanpa Agunan guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah tanpa harus adanya prasyarat penyerahan agunan. Produk pembiayaan UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.⁴ Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang menawarkan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Terdapat beberapa mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan UGT MTA di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain pemohon

⁴BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo, “Produk Pembiayaan UGT MTA,” <http://www.bmtugtsidogiri.co.id>, diakses pada 27 September 2017

menyerahkan form pengajuan pembiayaan yang telah diisi beserta persyaratan lainnya kepada BMT. Setelah penerimaan dokumen pemohon, pihak BMT bagian AOA (*account officer analysis*) melakukan analisa dan survey terhadap pemohon. Berdasarkan hasil survey dan analisa, pihak BMT memberikan keputusan penerimaan atau penolakan terkait pengajuan anggota. Bagi anggota yang diterima untuk melakukan pembiayaan, selanjutnya melakukan perjanjian (akad) terkait jumlah dan jangka waktu pembiayaan. Kemudian anggota dalam melaksanakan proses pencairan pembiayaan di kasir.

Meninjau pembahasan terkait analisa yang dilakukan oleh pihak AOA dalam pra pembiayaan adalah melakukan analisa dan survey terkait pemohon pembiayaan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo lebih menekankan pada 2 aspek dari prinsip 5C, yaitu segi karakter dan kemampuan anggota. 2 hal tersebut dinilai memiliki peranan penting terhadap analisa terhadap anggota pembiayaan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melakukan survey ke tempat tinggal atau usaha anggota dan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai identitas pribadi anggota. Dengan begitu, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat menilai pribadi pemohon tersebut apakah bisa dikatakan baik atau sebaliknya. Sehingga, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat memberikan keputusan mengenai persetujuan atau

penolakan terkait pengajuan anggota untuk melakukan pembiayaan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA).

Ketentuan yang diterapkan bagi anggota yang melakukan pembiayaan produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo, antara lain : jenis pembiayaan merupakan pembiayaan modal usaha, pembiayaan berlaku untuk perorangan, plafond yang diberikan maksimal sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu selama 1 tahun, dan pemohon merupakan anggota yang aktif menabung setiap melakukan angsuran pelunasan pembiayaan serta pemohon merupakan pedagang punya stand dipasar.⁵

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah bil wakalah*. Penggunaan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) digunakan anggota untuk modal usaha. Produk UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) memiliki 2 keuntungan yaitu bersifat mudah dan tanpa persyaratan penyerahan agunan. Karena tanpa adanya persyaratan penyerahan agunan, produk ini tergolongkan produk yang mudah dan cepat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dimudahkan dalam hal pembiayaan. Akan tetapi pada prakteknya, beberapa anggota yang melakukan pembiayaan produk UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA) tidak

⁵ Moh. Chafidudin, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Januari 2018.

mematuhi ketentuan dan ketetapan yang telah diberlakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Tanpa adanya persyaratan penyerahan agunan menjadi peluang bagi para anggota untuk melakukan tindak kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah terkait persoalan pembayaran, baik dalam keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak melakukan pembayaran. Sehingga tindakan tersebut merugikan pihak BMT, terlebih anggota dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Tindakan penyelewengan tersebut, telah dilarang Allah SWT dalam surah QS. Al-Anfaal (8):27⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.s Al-Anfaal : 27).⁷

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk berkhianat baik terhadap Allah, rasul dan manusia. Dan juga melarang untuk melakukan pengkhianatan terhadap seseorang yang telah memberikan kepercayaan kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pembiayaan produk Multiguna Tanpa

⁶ Al-Our'an, 8:27.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Quran, 2014), 180.

Agunan (MTA) seharusnya kedua belah pihak menepati kewajiban masing-masing. Khususnya bagi pihak anggota yang melakukan pembiayaan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Akan tetapi, pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) terdapat beberapa anggota yang tidak menepati janjinya atau dapat dikatakan berkhianat.

Produk pembiayaan rentan terjadinya risiko, karena pihak BMT melakukan pendistribusian dana untuk dimanfaatkan para anggota. Sehingga apabila dana tersebut tersalurkan ke anggota yang mempunyai i'tikad kurang baik maka mengakibatkan terjadinya kemacetan atau gagal bayar. Produk pembiayaan yang disertai adanya persyaratan penyerahan agunan masih terdapat risiko, apalagi pada produk pembiayaan tanpa disertai persyaratan penyerahan agunan. Apabila pihak anggota melakukan pelanggaran, maka pihak BMT tidak dapat melakukan pelelangan atau penjualan atas aset anggota. Sehingga risiko pembiayaan bermasalah lebih rentan terjadi pada produk pembiayaan UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo. Pada produk UGT MTA di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo terdapat beberapa anggota pembiayaan yang bermasalah terkait ketepatan dalam hal melakukan pembayaran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan.

Jumlah pembiayaan produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo tercatat pada tahun 2017, porsi total anggota pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan telah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

- Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diperlukannya batasan-batasan masalah. Batasan masalah yang terkait adalah :

Dari penjelasan latar belakang, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo ?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo ?

Pada kajian pustaka, terdapat penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang dimuat. Dengan demikian, peneliti menguraikan penelitian terdahulu yang sebagai bahan rujukan atau referensi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Eko Prasetyo “Strategi Penanggulangan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di *Baitul Māl wa Tamwīl Ta’awun* Cipulir”.

[illegible]

2. Penelitian Muhammad Yunus “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah untuk Menimilisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

¹⁰ Eko Prasetyo, “Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murābahah bermasalah di *Baitul Māl wa Tamwīl Taawun* Cipulir”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 77

[illegible]

yang diterapkan setelah proses pembiayaan dilakukan adalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *musyawarah*, dan sita aset (jaminan). BMT Bina Umat Mandiri mengalami beberapa kendala dalam hal penerapan strategi tersebut, yaitu apabila nasabah memiliki i'tikad kurang baik sehingga dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, BMT Bina Umat Mandiri dalam mengatasi hal tersebut sesuai dengan prinsip Islam.

3. Penelitian Nurjanah “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mampu menjaga angka NPF yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹² Strategi yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah *stay strategy* dan *exit strategy*.

4. Penelitian Laili Maulistina “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murābahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data

¹² Nurjanah, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016), 98.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu mencari data langsung ke lapangan tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder.¹⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara menggunakan strategi jalur litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan

¹⁴ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, 2011), ii.

- Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistem pendukung keputusan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada *Standard Chartered Bank* yang dapat digunakan untuk membantu dan mempermudah analisis kredit dalam menilai kelayakan calon kreditur.¹⁵ Sehingga, dengan sistem pendukung ini dapat memberikan keputusan mengenai calon kreditur, apakah diterima atau ditolak.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

¹⁵ Lucas Prasetyo, et al., “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank”, *Dinamika Informatika*, Maret 2012, No. 1 Vol 4., 87

2	Muhammad Yunus/2014/ Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan <i>Murābahah</i>	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)
3	Nurjanah/2016/Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Fokus pada Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>Murābahah</i>	Fokus pada Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan tidak adanya agunan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan
4	Laili Maulistina/2017/Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad <i>Murābahah</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)	Fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan ekonomi syariah pada produk dengan akad <i>Murābahah</i> dan difokuskan dalam perspektif Ekonomi Islam	Fokus pada strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo berlokasi pada alamat Desa Ngaban RT/RW. 03/01 Tanggulangin Sidoarjo. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu didirikan pada tanggal 6 Maret 2012. Pada awal operasional, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memiliki 4 karyawan aktif.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Merupakan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data tersebut berkaitan dengan mekanisme pengajuan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, diantaranya adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang berasal dari sumber asli tanpa melalui perantara.¹⁶ Pada penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap pengurus BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo khususnya pegawai yang menangani secara langsung terhadap proses produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dan anggota pembiayaan yang bermasalah pada produk

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010) , 171

Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber untuk memperoleh data atau informasi yang bukan dari sumber pertama untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, literatur, laporan-laporan, atau lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dengan informan untuk menggali berbagai masalah, berbagai pemaknaan mengenai masalah penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara juga digunakan untuk menggali berbagai konten di sekitar masalah penelitian.¹⁸ Wawancara akan dilakukan oleh peneliti terhadap para pengurus BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo mengenai produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) serta melakukan wawancara kepada para anggota yang telah melakukan pembiayaan

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 19

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 155

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap obyek yang ditelitinya. Observasi didasarkan atas pengambilan data pad fakta sebenarnya sesuai dengan hasil pengamatan. Metode observasi menghasilkan data yang lebih rinci terkait perilaku, objek, dan lain sebagainya daripada metode wawancara. ¹⁹ Teknik observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menghadapi anggota yang bermasalah.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian.²⁰ Studi dokumentasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti berupa dokumentasi dari BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo mengenai produk Multiguna Tanpa Agunan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dimuat dalam bentuk buku, catatan, data dan lain sebagainya.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 87.

²⁰ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 61.

5. Teknik Analisis Data

I. Sistematika Penulisan

²³ Ibid, 245.

berfungsi memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penulisan, idenifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori yang memuat pengertian dari pembiayaan bermasalah, pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan *Bait Al-māl Wa At-tamwīl*.

Bab tiga merupakan data penelitian yang berisi mengenai informasi tentang BMT UGT Sidogiri berkaitan dengan latar belakang BMT UGT Sidogiri, visi misi BMT UGT Sidogiri, struktur organisasi dan produk-produk BMT UGT Sidogiri, mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA), dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA).

Bab empat merupakan analisis terhadap mekanisme pembiayaan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan mengenai apa yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran berkaitan dengan penulisan skripsi.

PEMBIAYAAN BERMASALAH, PEMBIAYAAN MULTIGUNA
TANPA AGUNAN, *BAIT AL-MĀL WA AT-TAMWIL*

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 160.

²⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 94.

tamwīl (BMT). BMT menawarkan produk pembiayaan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan fasilitas terjangkau dibandingkan dengan yang diterapkan oleh perbankan syariah. Sebagaimana dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hadīd ayat 11 :²⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)²⁷

Ayat diatas, menjelaskan bahwa siapa pun yang memanfaatkan hartanya untuk membantu (meminjamkan) kepada sesama manusia yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Hal tersebut selaras dengan pendistribusian produk pembiayaan BMT kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan dalam BMT adalah pembiayaan dengan perjanjian antara pihak BMT dengan anggota berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga BMT tidak selalu berjalan lancar. Produk pembiayaan cenderung dinilai

²⁶ Al-Quran, 57: 11.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Quran, 2014), 538.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kemacetan atau permasalahan terkait pelunasan dikarenakan unsur ketidaksengajaan atau disengaja oleh pihak anggota pembiayaan.²⁹ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi kewajibannya oleh pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana.³⁰

Menurut Aharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh tindakan atau perilaku anggota yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.³¹ Dengan demikian terjadinya

³¹ Aharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian pada Produk *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Iqtoshadia*, No. 1, Vol. 10 (2017), 76.

penunggakan pembiayaan pembiayaan macet disebabkan kesengajaan oleh pihak anggota.

Penundaan pembayaran akan mempengaruhi operasional lembaga yang terkait, terlebih tingkat pembiayaan bermasalah dinilai tinggi. Semakin tinggi produk pembiayaan yang tersalurkan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang terjadi. Sebelum proses persetujuan, bagi anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di BMT tersebut.

2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan

Anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan kepada BMT sebelumnya harus memenuhi berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Tujuan diberlakukannya prosedur pengajuan pembiayaan ini adalah untuk memastikan pencairan yang dilakukan oleh anggota terkait pembiayaan tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai. Prosedur pengajuan antara BMT satu dengan yang lainnya tentu berbeda.

Menurut Lukman Dendawijaya proses prosedur dari pengajuan pelaksanaan pembiayaan hingga pembayaran, antara lain³² :

³² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 73

b. Analisa kredit atau pembiayaan

Dokumen yang telah diterima oleh pihak BMT akan dianalisa oleh pihak *account officer* (AO). Analisa tersebut terkait isi atau keterangan yang tertera pada dokumen data pemohon. Analisa tersebut berkaitan dengan prinsip 5C (*character, capital, collateral, condition of enonomy*, dan *capacity*). Selanjutnya akan dilakukannya tahap wawancara kepada pemohon secara langsung untuk memastikan kebenaran atas dokumen yang diserahkan.

- Pemohon diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Dokumen yang diserahkan harus dijamin keabsahan dan keasliannya.

Ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada semua umatnya untuk menepati janji. Sebagaimana dengan orang yang berhutang,wajib untuk membayar semua hutang-hutangnya sebagaimana dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Setelah disepakatinya berbagai persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, maka tahap selanjutnya adalah pencairan kredit atau pembiayaan. Pencairan diberikan sesuai dengan besaran jumlah plafond yang telah disepakati.

Suatu keharusan bagi BMT untuk melaksanakan tahap ini, proses pengawasan atau *monitoring* terkait usaha anggota dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan. Pengawasan dapat dilakukan berupa melakukan kunjungan langsung ke usaha anggota secara rutin, memonitoring terkait pembayaran angsuran secara rutin,

[illegible]

kepercayaan seorang anggota.³⁶ Penilaian karakter bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakter anggota pembiayaan. Penilaian karakter tersebut dapat memberikan informasi terkait pribadi anggota. Penilaian karakter dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota dan masyarakat sekitar. Hasil dari wawancara akan disesuaikan dengan dokumen yang diserahkan oleh anggota dan menjadi bahan pertimbangan atas pengajuan permohonan pembiayaan anggota.

b. *Capacity*

Capacity atau kemampuan adalah penilaian tentang kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran pembiayaan terkait laba usaha yang dijalankan. Penilaian kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana anggota mengelola usahanya sehingga dapat melakukan pembayaran pembiayaan yang telah disepakati berdasarkan jumlah dan waktunya.

Menurut Binti Nur Asiyah, *capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pembiayaan dari laba yang dihasilkan.³⁷

Menurut Lukman Dendawijaya, *capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi

³⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen...*, 80.

³⁷ Ibid, 81

kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian terkait pokok dan margin sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.³⁸

c. *Capital*

Capital yaitu penilaian terkait dengan jumlah modal yang dimiliki oleh anggota berupa aset. Menurut Lukman Dendawijaya, penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki oleh calon anggota guna membiayai proyek yang akan dijelankannya.³⁹

d. *Condition of Economy*

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, *Condition of economy* merupakan analisa terkait keadaan perekonomian pada umumnya dan usaha yang dijalankan oleh si pemohon pembiayaan.⁴⁰ Kondisi perekonomian baik atau buruknya mempengaruhi terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh anggota.

e. *Collateral*

Collateral merupakan aset anggota pembiayaan yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukannya. Agunan atau jaminan yang diserahkan harus memiliki nilai jual dan kondisi fisik yang baik. Menurut Binti Nur Aisyah, penilaian terhadap suatu jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status

³⁸ Lukman Dendawiaya, *Manajemen...*,90.

³⁹ Ibid., 89.

⁴⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107.

B. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan identik dengan persyaratan penyerahan agunan. Penyerahan agunan menjadi pegangan lembaga keuangan apabila pihak debitur bermasalah agunan tersebut dapat dilelang atau diperjual belikan. Agunan merupakan aset kebendaan baik bergerak maupun tidak atas hak kepemilikan anggota.

[illegible]

golongan menengah ke bawah. Meninjau hal tersebut, ditawarkannya produk pembiayaan yang bebas dari persyaratan penyerahan agunan.

Menurut Ismail, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang ditawarkan kepada pihak debitur tanpa adanya dukungan jaminan. Kredit tersebut diberikan kepada pihak debitur didasarkan atas kepercayaan bahwa dapat melunasi hutangnya dengan baik.⁴² Tanpa adanya penyerahan agunan, maka tingkat terjadinya risiko bernilai tinggi. Dikarenakan pihak kreditur tidak dapat melakukan pelelangan atau jual beli terhadap jaminan aset nasabah.

Menurut Ali Suyanto Herli, kredit tanpa jaminan adalah produk pendistribusian dana dalam bentuk pemberian pinjaman kepada debitur tanpa disertai adanya agunan atau aset yang diserahkan kepada pihak kreditur untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁴³ Tanpa adanya jaminan sebagai persyaratannya pihak kredit hanya menilai terkait riwayat dan kemampuan pemohon untuk melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut. Pemberian produk tanpa jaminan atau agunan harus dilakukan dengan hati-hati, karena banyaknya debitur yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.

Produk pembiayaan dinilai berisiko tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Terlebih apabila produk pembiayaan tanpa

⁴² Ismail, *Manajemen...*,107.

⁴³ Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2013), 25

Pemberian produk tanpa agunan harus dilaksanakan dengan unsur kehati-hatian, terlebih dalam melakukan analisa debitur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standart Operasional dan Prosedur (SOP).⁴⁴ Akan tetapi, produk pembiayaan tanpa agunan ini masih identik dengan pembiayaan bermasalah. Penyalahgunaan atas produk pembiayaan tanpa agunan tersebut disebabkan beberapa faktor, baik dari pihak BMT, anggota, atau yang lainnya.

Terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah⁴⁵ :

Kurangnya tingkat analisa yang dijalankan oleh pihak intern sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak intern, sehingga tidak dapat melakukan analisa dengan tepat dan akurat. Dan

⁴⁵ Ismail, *Manajemen...*, 125.

b. Faktor Ekstern

1) Anggota dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dikarenakan anggota tidak memiliki kemauan dalam melakukan pembayaran.

b) Unsur ketidaksengajaan

2) Usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami penurunan. Akibatnya, anggota tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya.

Tanpa Agunan

Menurut Nurjanah dan Dewi Laela strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan kategori kolektibilitas adalah sebagai berikut⁴⁸ :

[illegible]

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha penyelamatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank terhadap nasabah yang mulai mengalami suatu kesulitan.⁴⁹

Menurut Dewi Nurul Musjtari, pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan melalui beberapa strategi, antara lain : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁵⁰

Penjadwalan kembali merupakan perubahan jangka waktu pelunasan pembayaran pembiayaan. Anggota diberikan keringanan terkait penambahan jangka waktu dari yang telah ditetapkan. Apabila anggota belum melakukan pembayaran secara keseluruhan akan tetapi sudah jatuh tempo pelunasan. Maka, dengan strategi penjadwalan kembali ini anggota diberikan tambahan waktu guna melakukan pelunasan pembiayaan.

⁵⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian...*, 189.

- 1) Pemberian tambahan dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Ketiga strategi tersebut dapat diterapkan secara kombinasi, seperti perpaduan antara *rescheduling* dengan *reconditioning*. Pemberian fasilitas potongan jumlah yang harus dibayarkan dengan tambahan waktu yang diberikan. Tentu saja kombinasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari anggota. Dan apabila strategi-strategi tersebut belum maksimal untuk diterapkan. Maka, pihak lembaga menerapkan strategi Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP).

1. Definisi *Bait Al-Māl Wa At-Tamwil* (BMT)

⁵⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 449

Menurut Darsono dkk, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di bidang usaha mikro dan kecil.⁵⁶ BMT memiliki peranan sebagai lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan syariah dengan prinsip bagi hasil dan menumbuhkan kembangkan derajat dan martabat masyarakat dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.⁵⁷ Dalam operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan.⁵⁸

BMT didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang, antar pendiri tidak ada hubungan tali keluarga, dan pendiri dapat bertambah dengan izin atau kesepakatan para pendiri lainnya.⁵⁹ BMT menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan berupa tabungan dengan akad Modal BMT terdiri dari simpanan pokok dan

⁵⁶ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 323.

⁵⁸ Ellysa Puji Pangestu, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murābahah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT HIRA TANON), (Skripsi--IAIN Surakarta, 2017), 17

[illegible]

simpanan pokok khusus. BMT memiliki visi dan misi dalam menjalankan operasionalnya yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan *Bait Al-Māl Wa At-Tamwil* (BMT)

Menciptakan kehidupan masyarakat yang selamat, damai, dan sejahtera sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.⁶⁰

3. Fungsi *Bait Al-Māl Wa At-Tamwil* (BMT)

BMT memiliki 2 fungsi dalam operasionalnya, diantaranya adalah :

a. *Bait Al-māl*

BMT sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pendistribusian atas dana titipan berupa zakat, infaq, dan sedekah. Pada fungsi ini, BMT lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan pendistribusian dana yang bersifat non-profit.⁶¹

b. *Bait At-tamwil*

BMT berperan sebagai lembaga pengembangan harta berupa melakukan kegiatan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dalam usaha produktif atau investasi.

⁶⁰ Nurul Huda, *Keuangan...*, 286.

⁶¹ Darsono, et al., *Perbankan...*, 324.

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
MULTIGUNA TANPA AGUNAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG
PEMBANTU TANGGULANGIN SIDOARJO**

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo

BMT UGT Sidogiri memperoleh badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat

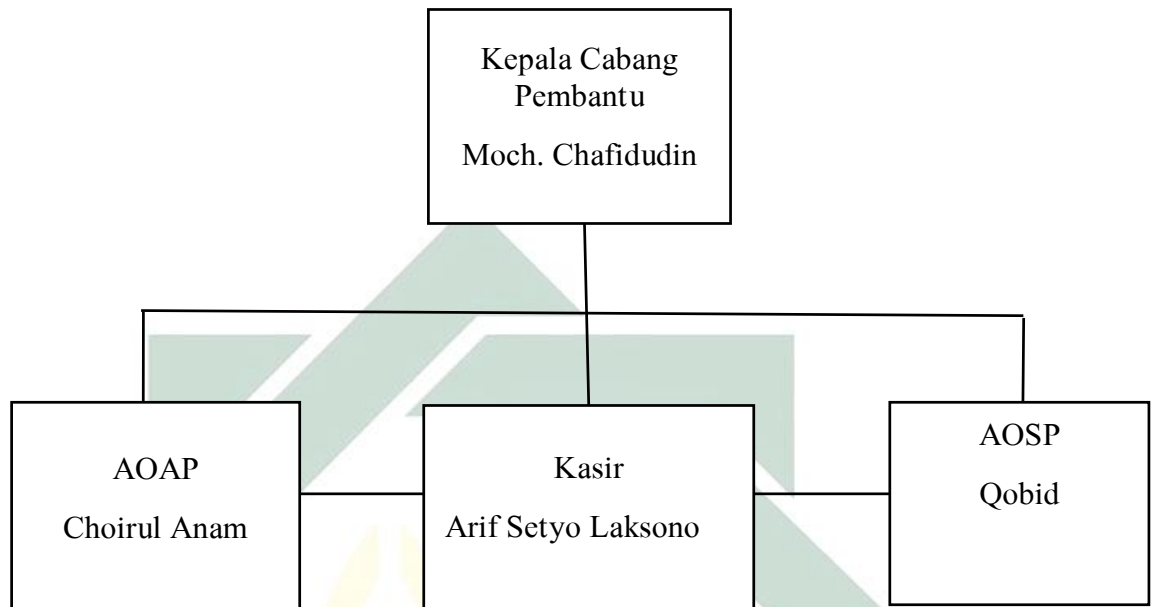
a. Visi

- b. Misi

- ### 3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

[illegible]

Gambar 3.1
Susunan Organisasi Kepengurusan



Sumber : kepala BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo

b. Deskripsi tugas

- 1) Kepala cabang pembantu
 - a) Memastikan tercapainya penyaluran pembiayaan sesuai target
 - b) Menjaga kualitas pembiayaan
 - c) Melakukan akad dan penanda tanganan perjanjian pembiayaan
 - d) Melakukan permohonan dan melakukan penghapus bukuan pembiayaan kepada DB melalui KDL
 - e) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target pembiayaan dengan semua karyawan bawahannya.

- a) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur
- b) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIMBT
- c) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah
- d) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah
- e) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi
- f) Memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan
- g) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL

- a) Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota
- b) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur
- c) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.

a) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas

4. Produk-produk BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin
Sidoarjo

- 1) Tabungan umum syariah
- 2) Tabungan haji
- 3) Tabungan umrah
- 4) Tabungan hari raya idul fitri
- 5) Tabungan pendidikan
- 6) Tabungan qurban
- 7) Tabungan tarbiyah
- 8) Tabungan berjangka
- 9) Tabungan MDA berjangka plus

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)
- 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
- 3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
- 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
- 5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
- 6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

“Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan ketentuan besaran plafond yang diberikan sebesar satu juta. Lah, untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur melalui setoran tabungan anggota. Jadi, nanti kita bisa langsung mengambil dari tabungan si anggota tersebut. Untuk angsurannya bisa dilakukan dalam harian, mingguan atau bulanan. Semua tergantung dengan apa yang dipilih oleh anggota dan telah disepakati bersama”.⁶⁴

bid, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Januari 2018.

[illegible]

Prosedur pengajuan pembiayaan multiguna antara lain, sebagai berikut

.65

Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BMT. Dokumen yang diserahkan berisikan tentang data diri, tujuan pembiayaan, plafond pembiayaan, dan lain sebagainya. Pemohon diharuskan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan lengkap dan asli.

[illegible]

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota produk MTA “pas waktu pinjam yang 1.000.000 apa ya mbak persyaratannya. Cuma itu-itua aja, paling ya setor fotocopy KTP, KK, sama buku nikah”.⁶⁶

f. Pelaksanaan akad

g. Serahkan berkas dan akad pembiayaan ke kasir

h. Terima dan pelaksanaan pencairan pembiayaan

[illegible]

i. Serahkan berkas pembiayaan ke AOA

Setelah dilakukannya pencairan, berkas anggota diserahkan kembali kepada pihak AOA.

j. Simpan berkas pembiayaan

Berkas anggota yang diterima oleh pihak AOA selanjutnya akan disimpan.

4. Analisa pra pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo

Analisa pra pembiayaan terdapat prinsip 5C, akan tetapi pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo pada produk Multiguna Tanpa Agunan hanya menerapkan prinsip 4C, diantaranya *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. Dikarenakan pada produk ini tidak terdapat agunan atau *collateral*.

a. Character

Analisa karakter merupakan salah satu analisa yang ditekankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri. Pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melakukan tahapan wawancara langsung terhadap anggota guna mengetahui kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang telah diserahkan oleh anggota pada tahap awal pengajuan pembiayaan. Melalui tahapan wawancara dapat diketahui karakter anggota apakah anggota tersebut jujur atau sebaliknya.

character. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak

Sholeh Wafie selaku direktur I :

“Dari berbagai analisa tersebut BMT Sidogiri lebih menekankan pada prinsip 2C yaitu *character* dan *capacity* anggota. Karena 2C tersebut merupakan faktor penting dari proses analisa terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu, kita lebih menekankan di 2 faktor tersebut.”⁶⁸

Pihak BMT UGT Sidogiri melakukan analisa terkait kemampuan anggota berdasarkan usaha yang dijalankan oleh anggota, apakah usaha tersebut tergolong layak atau sebaliknya. Melalui survey terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, dapat diketahui tingkat kemampuan anggota dalam melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajibannya. Semisal, usaha tersebut laris dan hampir tidak pernah sepi pembeli. Tingkat kemampuan anggota dapat dilihat dari laporan keuangan, apabila anggota tidak memiliki laporan keuangan maka dapat diketahui melalui nota pembelian. Sehingga bisa mengetahui bagaimana proses perputaran keuangan anggota.

c. *Capital*

Analisa *capital* atau modal merupakan analisa terkait aset yang dimiliki oleh anggota guna melakukan pelunasan pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan. BMT UGT Sidogiri melakukan analisa *capital* anggota dengan cara survey ke tempat tinggal dan usaha yang dijalankan oleh anggota. BMT UGT Sidogiri melakukan

⁶⁸ Sholeh Wafie, *Wawancara*, Pasuruan 27 Oktober 2017.

analisa *capital* berupa kepemilikan aset yang dimiliki oleh anggota. semisal, aset usaha, barang dagangan, dan aset tempat tinggal.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Sholeh Wafie selaku direktur I : “lah analisa *capital* ini kan terkait modal yang dimiliki oleh anggota. Kita melakukan analisa dan survey ke tempat tinggal dan usaha anggota. Dari sana kita bisa mengetahui seberapa aset yang dimiliki oleh anggota. kita juga bisa melihat barang dagangan yang dijual oleh anggota”.⁶⁹ Selain itu, analisa *capital* anggota dapat dilihat dari rekening tabungan anggota.

d. *Condition of Economy*

BMT UGT Sidogiri dalam melakukan analisa terkait *condition of economy* dapat diketahui dari usaha dan tempat tinggal anggota. bagaimana prospek usaha yang dijalankan dan bagaimana lingkungan dari tempat tinggal . Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Sholeh Wafie selaku direktur I BMT UGT Sidogiri : “dalam analisa yang kita lakukan, terkait analisa kondisi ekonomi kita melakukan survey ke usaha dan tempat tinggal anggota. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi perekonomian dari anggota tersebut”.⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sholeh Wafie, bahwa analisa yang dilakukan oleh BMT

⁶⁹ Sholeh Wafie, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Oktober 2017.

⁷⁰ Ibid.

BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo telah menerapkan berbagai analisa pra pembiayaan sebelum memberikan keputusan terkait permohonan yang diajukan oleh anggota. Akan tetapi, masih terdapat beberapa anggota yang bermasalah dalam hal pembayaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

Zubaidah mengatakan, “Waktu melakukan pinjaman ke Sidogiri saya dikasih jangka waktu 3 bulan. Dulu saya rutin mbak, kalau mengangsur. Tapi, saya juga pernah telat bayar karena pas waktu itu dagangan saya sepi. Jadi ya, bayarnya agak telat gitu mbak. Tapi saya juga bilang ke mas Anam nya kalau lagi sepi-sepinya. Sama mas Anam nya diperbolehkan mbak. Jadi, ya ini lagi bayar kekurangan-kekurangan itu”.⁷⁴

Zubaidah merupakan anggota pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Tujuan anggota tersebut mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang

[illegible]

Di sisi lain, pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami penurunan. Sebagaimana dengan hasil dari wawancara dengan anggota pembiayaan bermasalah produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) lainnya, sebagai berikut :

Tri Umarianah, “Dulu saya mengajukan pembiayaan untuk beli barang dagangan mbak. Lah itu saya seharusnya jangka waktu pembayaran selama 3 bulan, tapi saya baru bisa lunas di bulan ke 4nya. Karena waktu itu kondisi saya lagi ada musibah, saya harus ke Jombang karena ada pihak keluarga yang sakit. Tapi, pihak BMTnya memaklumi, karena biasanya saya bayarnya tepat waktu cuman waktu itu lagi dapat musibah aja jadinya telat. Saya biasanya bayarnya titip ke teman saya. Jadi, selama pihak BMT tidak mendatangi saya, jadi saya pikir urusan pembayarannya sudah lunas. Lah temen saya itu, udah gak ada kabarnya. Entah pindah kemana”.⁷⁵

Hasil wawancara dari Tri Umarianah bahwa anggota merasa sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada BMT. Anggota mengaku telah melakukan pembayaran melalui teman yang bernama Churin In. Akan tetapi, anggota tersebut tidak pernah mendapatkan bukti

[illegible]

Berdasarkan hasil penjelasan wawancara dari Tri Umarianah dan Luhfiah, peneliti mendatangi tempat tinggal Churin In. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh tetangga sekitarnya bahwa pihak yang bersangkutan (Churin In) sudah tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut.

Meninjau hal tersebut, menurut hasil wawancara dari Choirul Anam selaku AOAP sebagai berikut :

“Untuk masalah mengenai Tri sama Luthfiyah memang dulunya sering titip ke Churin mbak. Karena mereka jualannya di pasar yang sama, jadi pembayarannya titip ke Churin. Dulu pembayarannya tergolong lancar dan rutin, tetapi karena kondisi Churin ini pindah kerja ke daerah Bangil jadinya agak macet gini. Untuk penagihannya kita tidak melakukan ke Tri sama Luthfiyah karena mereka melakukan pembayarannya titip ke Churin, jadi kita ya

[illegible]

Meninjau hal tersebut anggota masih memiliki i'tikad yang baik untuk melakukan pelunasan kepada pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo. Pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memberikan keringanan kepada anggota yang bermasalah dengan memberikan tambahan waktu atau memperkecil jumlah angsuran anggota yang disesuaikan dengan kemampuan anggota tanpa mengurangi sisa kewajiban nasabah agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan dan pembiayaan menjadi lancar kembali.

[illegible]

Menurut penjelasan dari pihak kepala cabang pembantu BMT UGT Sidogiri Cabang Tanggulangin Sidoarjo bahwa :

“Kalau ada yang mengalami tunggakan, kami tanyakan dulu mbak sebabnya kenapa. Kemudian kami cek kebenarannya dulu. Apakah yang dikatakan oleh anggota itu benar atau sebaliknya. Kalau setelah di cek dan hasilnya sesuai dengan yang dikatakan oleh anggota, maka anggota kami beri tambahan waktu untuk melunasi kekurangannya. Tambahan waktu yang kami berikan juga disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh anggota”.⁸¹

Dengan demikian, selain memberikan tambahan waktu pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo juga memberikan keringanan-keringanan terkait pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Strategi *reconditioning* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dengan memberikan potongan kepada anggota terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Penurunan jumlah margin yang ditetapkan kepada anggota yang bermasalah apabila anggota tersebut masih dinilai mampu untuk melakukan pembayaran atas margin yang telah ditentukan. Akan tetapi, terkait margin yang dikenakan dinilai terlalu tinggi untuk kondisi anggota. Apabila anggota dinilai tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas margin tersebut, maka anggota yang diberikan pembebasan pengembalian bagi hasil.

Contoh kasus :

Penurunan margin yang sebelumnya dibebankan 1% per bulan kepada pihak anggota pembiayaan atas nama B yang semula margin per bulan sebesar 2% per bulan. Sehingga anggota B dapat melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

[illegible]

Para pemohon diharuskan menyerahkan persyaratan tersebut dengan lengkap dan teruji kebenarannya. Berbagai persyaratan tersebut diserahkan kepada pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo untuk diperiksa terkait kelengkapan dan keaslian berkas yang telah diserahkan oleh pemohon pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan. Berkas pemohon diserahkan kepada pihak AO (*Account officer analysis*) guna dilakukan pemeriksaan terkait kebenaran atas berkas tersebut.

Selanjutnya, Pihak AO akan melakukan berbagai analisa dan survey guna mengetahui kesamaan terhadap berkas yang diserahkan dengan realita yang ada. Analisa dan survey yang dilakukan oleh pihak AO tidak terlepas dari prinsip 4C dan unsur kehati-hatian. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada bab 2.⁸³ Pada analisa 4C, BMT UGT Sidogiri cabang

[illegible]

pembantu Tanggulangin Sidoarjo lebih menekankan pada 2C yaitu *character* dan *capacity*. Dimana analisa *character* anggota merupakan analisa untuk mengetahui kepribadian anggota. Analisa *character* dapat diketahui dari proses survey ke tempat tinggal atau usaha anggota melalui para tetangga sekitar anggota, apakah anggota tersebut memiliki kebiasaan yang baik atau sebaliknya, apakah anggota tenilai baik di lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Analisa *capacity* atau kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran atas pembiayaan yang dilakukan dengan melihat dari usaha yang dijalankan anggota, dikarenakan anggota tidak memiliki slip gaji atau pembukuan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo melihat apakah usaha yang dijalankan anggota tersebut laris atau sebaliknya. Selain itu, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo juga melihat nota pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh anggota.

Proses analisa dan survey yang dilakukan oleh pihak AO terkadang tingkat ketelitiannya kurang dan para anggota dinilai cukup mampu untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Sehingga pihak AO tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya secara detail seorang anggota. Hal tersebut terbukti pada saat penelitian dilakukan, terdapat beberapa alamat anggota yang bermasalah dikunjungi tidak memberikan hasil apapun. Beberapa alamat tempat tinggal anggota tersebut sudah tidak berpenghuni lagi.

Sehingga perlunya ada peningkatan dari segi analisa dan survey yang dilakukan oleh pihak AO terhadap anggota.

Setelah dilakukannya analisa dan survey oleh pihak AO, apabila hasil keputusan bahwa anggota tersebut layak untuk melakukan pembiayaan. Anggota pembiayaan akan melakukan akad terkait pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Dewi Nurul Mutjari terkait pentingnya akad dalam produk pembiayaan pada bab 2.⁸⁴ Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menggunakan akad *Mudharabah* dan *murābahah bil wakalah*. *Mudharabah* merupakan suatu akad bentuk kerjasama antara *shahibul māl* dengan *mudharib*. Sedangkan *murabahah bil wakalah* merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama mengajukan pembiayaan kepada pihak kedua guna membeli suatu barang, kemudian pihak kedua mewakili pembeliannya kepada pihak pertama, dengan akad *wakalah*. Selanjutnya akad *wakalah* berakhir ditandai dengan penyerahan barang dari pihak pertama ke pihak kedua kemudian diberlakukannya akad *Murabahah*.

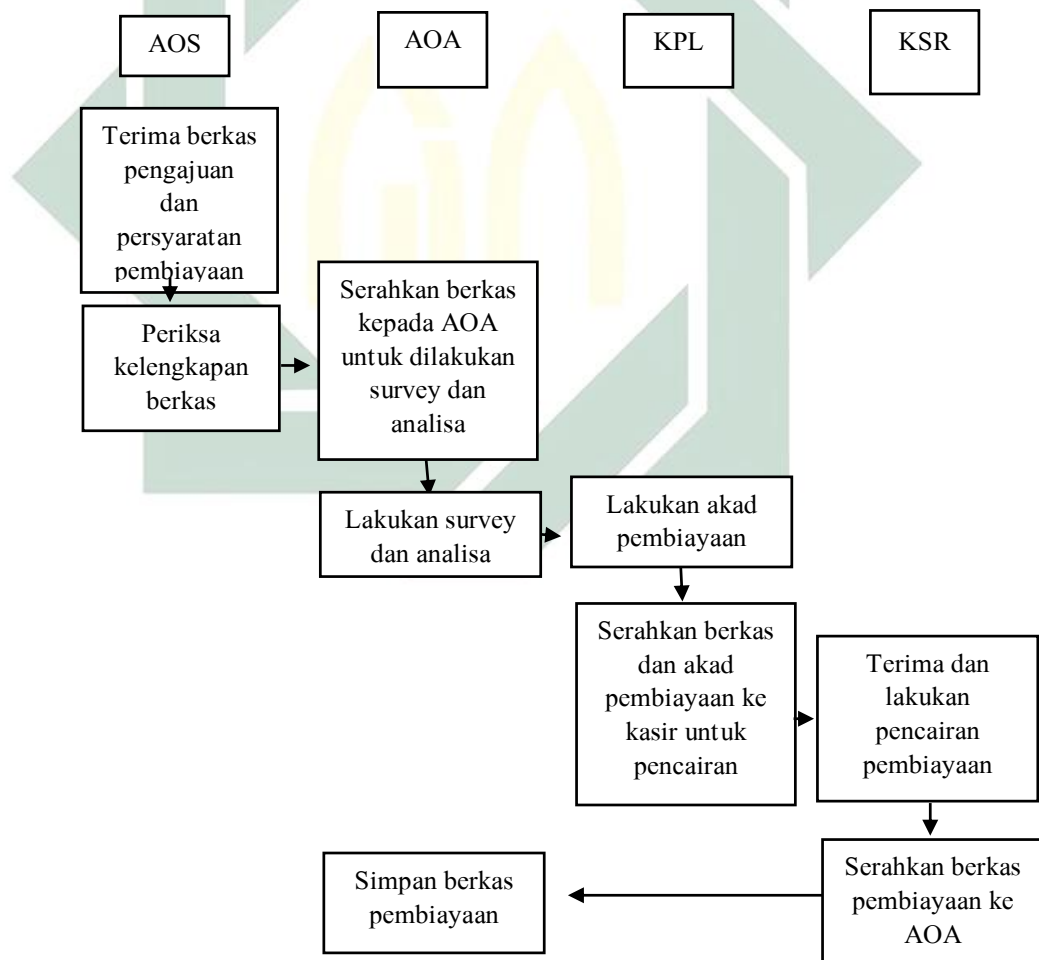
Setelah dilakukannya akad, berkas anggota diserahkan kepada pihak kasir untuk dilakukannya pencairan. Setelah proses pencairan, berkas anggota akan disimpan oleh pihak UGT Sidogiri Cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo terlebih pihak AOA. Berbagai mekanisme yang

⁸⁴ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaia...*, 125.

diterapkan pada produk Multiguna Tanpa Agunan dilakukan dengan upaya kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan tidak terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Gambar 4.1

Alur Prosedur Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan



Sumber : dokumen BMT UGT Sidogiri

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo

Berbagai mekanisme pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo telah sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi meninjau dari hasil penelitian pada tabel 3.1, terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah dengan angka yang cukup besar. Mengenai hal tersebut, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menerapkan beberapa strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut antara lain :

1. *Reschedulling*

Strategi *reschedulling* merupakan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dengan memberikan tambahan jangka waktu kepada anggota. Tambahan waktu diberikan bagi para anggota yang belum memenuhi kewajibannya. Terdapat beberapa kriteria anggota yang dapat diberlakukan strategi *reschedulling*, antara lain karena anggota mengalami musibah, usaha yang mengalami penurunan, dan anggota yang memiliki dana yang cukup tapi tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya.

Meninjau hal tersebut, pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memberikan opsi tambahan waktu guna memberikan kesempatan bagi para anggota untuk melakukan pembayaran. Tambahan waktu yang diberikan kepada para anggota

yang bermasalah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anggota tersebut. Apabila anggota yang bersangkutan mengalami suatu musibah yang cukup besar atau usaha yang dijalankan telah mengalami penurunan yang cukup besar, pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo akan memberikan opsi tambahan waktu yang telah disesuaikan dengan kondisi dari anggota tersebut.

Strategi *reschedulling* ini diterapkan pada salah satu kasus yang terjadi pada anggota atas nama Akus Ismaniah. Dimana pada kasus ini, anggota tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menilai bahwa anggota tersebut memiliki i'tikad baik, maka BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo memberikan kebijakan berupa *reschedulling*. Sehingga anggota tersebut dapat melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya.

Reschedulling dilakukan dengan ketentuan penambahan waktu yang diberikan kepada anggota yang bermasalah bebas dari adanya tambahan jumlah dana yang diberikan kepada pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Dewi Nurul Mustjari bahwa anggota yang bermasalah

pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo terhadap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga, sebagian besar terjadinya pembiayaan yang bermasalah dikarenakan kurangnya tingkat ketelitian serta kehati-hatian dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Strategi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo untuk menangani pembiayaan yang bermasalah tidak berbeda jauh dari teori yang ada. Akan tetapi, menurut Dewi Nurul Musjtari strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa strategi, antara lain : *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Akan tetapi terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo tidak menerapkan strategi *restructuring*.

Menurut peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 24 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diberlakukan pada permasalahan pembiayaan macet. Akan tetapi, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo menerapkan PPAP pada anggota yang memiliki sisa kewajiban dengan jumlah sedikit dan dinilai tidak berkemungkinan tertagih kembali. Hal tersebut dikarenakan apabila PPAP diterapkan pada seluruh anggota yang bermasalah akan merugikan keuangan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo masih terdapat beberapa pembiayaan yang tidak teratasi. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diberlakukan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan tingkat ketegasan dan kedisiplinan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dan anggota yang memiliki i'tikad yang baik.

Akan tetapi, sebaiknya produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan tidak diberlakukan lagi dikarenakan produk tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi dan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo dapat memberlakukan adanya pengikatan jaminan sebagai persyaratan pengajuan produk pembiayaan. Sehingga apabila terdapat anggota yang bermasalah dapat teratasi dengan baik dan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik dalam beberapa kesimpulan, antara lain :

- 86

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan perbaikan dan kemajuan bagi pihak BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Tanggulangin Sidoarjo :

- [illegible]

2017.

i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:

dy. “Implementasi dan Implikasi Revisi
lah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”,
geri Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yo

n. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi
Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group

Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Raja

Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghal

n Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis I*
rta:Graha Ilmu, 2014.

- 2017.
- i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:
- dy. “Implementasi dan Implikasi Revisi
lah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”,
geri Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yo
- n. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi
Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja
- Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghal
- n Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis I*
rta:Graha Ilmu, 2014.

- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung. Syaamil Quran. 2014.
- Maulistina, Laili. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murābahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung), Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Mustjari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pratama Publishing, 2012.
- Nurjanah. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", Skripsi--IAIN Purwokerto. 2016.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *el-JIZYA*, No. 1, Vol. 4. 2016.
- Pangestu, Ellysa Puji. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murābahah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT HIRA TANON)", Skripsi--IAIN Surakarta. 2017.
- Purhantara, Wahyu. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Prasetyo, Eko. "Strategi Penanggulangan Pembiayaan *Murābahah* bermasalah di *Baitul Māl wa Tamwil Taawun* Cipulir", Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

- Prasetyo, Lucas et al., “Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Standard Chartered Bank”, *Dinamika Informatika*, No. 1, Vol. 4. 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriyatni, Renny dan Andi Fariana. *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Susyanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: Badang Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016
- Wafi, Sholeh. *Wawancara*. Pasuruan. 11 Oktober 2017.
- Wijaya, Agung. “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok”, Tesis--Universitas Indonesia. 2011
- Yudistira, Reza. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah. 2011.
- Yunus, Muhammad. “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah untuk Meminimalisir Risiko di BMT Bina Umat Mandiri Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi--Uin Sultan Syarif Kasim Riau. 2014.
- Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- BMT UGT Sidogiri, “Produk Pembiayaan UGT MTA”, <http://www.bmtugtsidogiri.co.id>, diakses pada 27 September 2017.

